

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK TIMOR TIMUR

**Oleh:
Wahbi Rahman**

Jajak pendapat (*referendum*) rakyat Timor-Timur pada tahun 1999 yang diprakarsai oleh PBB dengan dua opsi yaitu berintegrasi dengan negara Republik Indonesia atau menjadi suatu negara merdeka, menghasilkan pilihan bagi rakyat Timor-Timur menjadi suatu negara merdeka dengan nama Timor Leste. Dalam hukum internasional peristiwa ini disebut dengan suksepsi negara. Peristiwa pergantian negara (suksepsi) menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satu di antaranya adalah masalah kewarganegaraan penduduk Timor-Timur. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan status Warga Negara Indonesia yang berada di Timor Timur pasca kemerdekaan Timor Leste dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis status penduduk Timor Timur di Indonesia pasca kemerdekaan Timor Leste menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) berdasarkan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kemerdekaan Timor Leste mempengaruhi status kewarganegaraan penduduk Timor Timur. Orang atau Warga Timor Timur yang berada di Timor Leste setelah kemerdekaan tetap menjadi penduduk atau Warga Negara Timor Leste, status Warga Negara Indonesia yang berada di Timor Leste pasca kemerdekaan dapat memilih dua opsi (pilihan) yaitu tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau menjadi warga negara Timor Leste, dan warga negara Timor Leste yang berada di Indonesia ketika Timor Leste merdeka dapat menjadi Warga Negara Indonesia atau tetap menjadi warga negara Timor Leste.

Kata Kunci: Akibat hukum, Kemerdekaan, Timor Leste dan Status Kewarganegaraan.